

## BAB II

### KAJIAN TEORETIK

#### A. Konsep Evaluasi Program

##### 1. Pengertian Evaluasi

Pengertian evaluasi menurut daniel L. Stufflebeam : *“Evaluation is the process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternatives”*.<sup>1</sup> Evaluasi merupakan menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk menilai alternative keputusan.

Kata evaluasi berasal dari bahasa inggris *“evaluation”* kata tersebut diserap ke dalam pembendaharaan.<sup>2</sup> menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata evaluasi berarti “penilaian” merupakan kata benda dari “nilai”. Evaluasi bukanlah hal baru dikarenakan hal tersebut senantiasa mengiringi kehidupan. Seorang manusia yang telah mengerjakan suatu hal, pasti akan menilai apakah Anderson dalam buku Suharsimi Arikunto memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan.<sup>3</sup> menurut Ngalm Purwanto, evaluasi adalah proses merencanakan, Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto, evaluasi adalah

---

<sup>1</sup> Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), h.3

<sup>2</sup> Sukardi, *Evaluasi Pendidikan Prinsip & Operasionalnya* (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), h.1

<sup>3</sup> Stufflebeam dan Shinkfield Dalam Eko Putro Widoyoko, *Evaluasi Program Pembelajaran* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h.3

orang yang melakukan pekerjaan evaluasi. Siapa yang dapat disebut subjek evaluasi untuk setiap tes, ditentukan oleh suatu aturan pembagian tugas atau ketentuan yang berlaku.<sup>4</sup>

Melihat uraian di atas, evaluasi merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang sesuatu yang dilakukan secara terencana, sistematis, terarah sebagai sebuah proses menilai sesuatu tersebut berdasarkan kriteria dan tujuan, yang selanjutnya digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil suatu keputusan. Sedangkan yang dimaksud proses evaluasi secara sistematis adalah mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi guna menentukan sejauh mana tujuan tercapai yang selanjutnya digunakan untuk membuat keputusan.

Melakukan evaluasi maka peneliti akan menemukan fakta pelaksanaan dilapangan yang hasilnya bisa positif ataupun negatif sebuah evaluasi yang dilakukan secara professional akan menghasilkan temuan yang obyektif yaitu temuan apa adanya baik data, analisis dan kesimpulannya tidak dimanipulasi yang pada akhirnya akan memberikan manfaat dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka sebuah program adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dalam jangka waktu tertentu dan melibatkan sekelompok orang yang dilakukan

---

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, *Evaluasi Program Pendidikan* (Jakarta : Bumi Aksara, 2009 ), h.6

untuk mendatangkan manfaat. Selain itu, sebuah program juga tidak hanya terdiri dari satu kegiatan melainkan rangkaian kegiatan yang membentuk satu system yang saling terkait satu dengan lainnya dengan melibatkan lebih dari satu orang untuk melaksanakannya.

Sedangkan menurut Bloom et. evaluasi, sebagaimana kita lihat, adalah pengumpulan kenyataan secara sistematis untuk menetapkan apakah dalam kenyataannya terjadi perubahan dalam diri siswa dan menetapkan sejauh mana tingkat perubahan dalam pribadi siswa.<sup>5</sup>

## 2. Evaluasi Program

Evaluasi program adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektifitas atau kecocokan sesuatu, sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>6</sup> Proses penetapan keputusan itu didasarkan atas perbandingan secara hati-hati terhadap data yang diobservasi dengan menggunakan standar tertentu yang telah dibakukan.

Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa evaluasi program merupakan upaya untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan program atau untuk mengetahui implementasi dari suatu kebijakan.<sup>7</sup> Dengan adanya evaluasi program, dapat membantu seberapa besar program tersebut telah berjalan,

---

<sup>5</sup> Bloom et, *Evaluasi Pendidikan* (Jakarta : Rineka Cipta, 2012 ), h.1

<sup>6</sup>Abdul Kadir Kardeng. *Thesis-Evaluasi Pelaksanaan Program BOS Sekolah Menengah Pertama di Semarang*. (Semarang. 2008)

<sup>7</sup>Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis bagi mahasiswa dan Praktisi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.30

dan sekaligus sebagai bahan pertimbangan kedepannya. Ralph Tyler dalam Suharsimi mendefinisikan bahwa evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan program sudah dapat terealisasi. Patton mengemukakan bahwa, "*Programme characteristics, and outcome of programs to make judgments about the program, improve program effectiveness and/or inform decision about future programming*".<sup>8</sup> Evaluasi program merupakan sebuah karakteristik sebuah program dan hasil dari program, untuk membuat penilaian tentang program, meningkatkan efektifitas program dan atau menginformasikan keputusan tentang pemrograman di masa depan.

Dari berbagai definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan evaluasi program adalah kegiatan mengumpulkan, menyusun dan mengolah informasi serta menganalisanya, tentang bekerja atau tidaknya suatu program atau sejauhmana program tersebut telah tercapai, sehingga bisa diketahui bila terdapat perbedaan antara rencana yang telah ditetapkan dengan hasil yang bisa dicapai, selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif atau pilihan yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan.

---

<sup>8</sup>Michael Quinn Patton, *Program Evaluation For Exercise Leaders*, (Auckland: Versa Press, 1999), h. 41

## **B. Konsep Program/Kebijakan yang di Evaluasi**

### **3. Pengertian Badan SAR Nasional**

Badan SAR Nasional (BASARNAS) adalah lembaga pemerintah nonkementrian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pencarian dan pertolongan (*Search and Rescue*). Yang awalnya berada dibawah naungan Departemen Perhubungan, dalam melaksanakan tugas pokoknya memerlukan dukungan dan partisipasi dari semua pihak dalam memanfaatkan berbagai fasilitas sarana, prasarana, personil dan material yang dimiliki oleh berbagai instansi pemerintah, swasta, organisasi, dan masyarakat. Mulai bulan November 2006, Badan SAR Nasional tidak lagi berada dibawah Departemen Perhubungan (Dephub).

Menurut Hatta Rajasa (24/11/2006) selaku Menteri Perhubungan, Badan SAR Nasional berbeda dengan Komisi Nasional Kecelakaan Transportasi (KNKT) dan Dewan Kecelakaan. KNKT bertugas mengecek dan menyelidiki penyebab suatu kecelakaan transportasi agar kecelakaan serupa tidak terulang.

Dewan Keselamatan memberi masukan sebagai penguatan aspek keselamatan sebelum kecelakaan terjadi. Badan SAR Nasional melakukan tugas pembinaan, pengkoordinasian, dan pengendalian potensi SAR (*Search and Rescue*) dalam kegiatan SAR (*Search and Rescue*) terhadap orang dan material yang hilang atau di khawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam pelayaran dan penerbangan, serta memberikan bantuan dalam

bencana dan musibah lainnya sesuai dengan peraturan SAR nasional dan internasional.

Berdasarkan kajian dan analisa kelembagaan, sesuai dengan perkembangan dan tuntutan tugas yang lebih besar, pada Tahun 2007 dilakukan perubahan Kelembagaan dan Organisasi Badan SAR Nasional menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), yang diatur secara resmi dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional. Sebagai LPND, Badan SAR Nasiona berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pada Perkembangannya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2009, sebutan LPND berubah menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), sehingga Badan SAR Nasiona pun berubah menjadi Badan SAR Nasiona (LPNK). Sebagai LPNK, Badan SAR Nasiona secara bertahap melepaskan diri dari struktur Kementerian Perhubungan. Namun hingga Tahun 2009, pembinaan administratif dan teknis pelaporan masih melalui Kementerian Perhubungan. Selanjutnya per Tahun 2007 Badan SAR Nasiona (LPNK) akan langsung bertanggung jawab ke Presiden melalui Sekretariat Negara (Setneg)

a. Sejarah Badan SAR Nasional

Lahirnya organisasi SAR di Indonesia yang saat ini bernama Badan SAR Nasional diawali dengan adanya penyebutan "**Black Area**" bagi suatu negara yang tidak memiliki organisasi SAR.

Dengan berbekal kemerdekaan, maka tahun 1950 Indonesia masuk menjadi anggota organisasi penerbangan internasional ICAO (*International Civil Aviation Organization*). Sejak saat itu Indonesia diharapkan mampu menangani musibah penerbangan dan pelayaran yang terjadi di Indonesia. Sebagai konsekuensi logis atas masuknya Indonesia menjadi anggota ICAO tersebut, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1955 tentang Penetapan Dewan Penerbangan untuk membentuk panitia SAR. Panitia teknis mempunyai tugas pokok untuk membentuk Badan Gabungan SAR, menentukan pusat-pusat regional serta anggaran pembiayaan dan materil.

Sebagai negara yang merdeka, tahun 1959 Indonesia menjadi anggota *International Maritime Organization* (IMO). Dengan masuknya Indonesia sebagai anggota ICAO dan IMO tersebut, tugas dan tanggung jawab SAR semakin mendapat perhatian. Sebagai negara yang besar dan dengan semangat gotong royong yang tinggi, bangsa Indonesia ingin mewujudkan harapan dunia internasional yaitu mampu menangani musibah penerbangan.

#### b. Perkembangan Organisasi Badan SAR Nasional

Berdasarkan hasil survey tersebut ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 1972 tanggal 28 Februari 1972 tentang pembentukan Badan SAR Indonesia (BASARI). Adapun susunan organisasi BASARI terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan
2. Pusat SAR Nasional (Pusarnas)
3. Pusat-pusat Koordinasi Rescue (PKR)
4. Sub-sub Koordinasi Rescue (SKR)
5. Unsur-unsur SAR<sup>9</sup>

PUSARNAS merupakan unit BASARI yang bertanggung jawab sebagai pelaksana operasional kegiatan SAR di Indonesia. Walaupun dengan personil dan peralatan yang terbatas, kegiatan penanganan musibah penerbangan dan pelayaran telah dilaksanakan dengan hasil yang cukup memuaskan, antara lain Boeing 727-PANAM tahun 1974 di Bali dan operasi pesawat Twinotter di Sulawesi yang dikenal dengan operasi Tinombala.

Secara perlahan PUSARNAS terus berkembang dibawah pimpinan (alm) Marsma S. Dono Indarto. Dalam rangka pengembangan ini pada tahun 1975 PUSARNAS resmi menjadi anggota NASAR (*National Association of SAR*) yang bermarkas di Amerika, sehingga PUSARNAS secara resmi telah terlibat dalam kegiatan SAR secara internasional. Tahun berikutnya PUSARNAS turut serta dalam kelompok kerja yang melakukan penelitian tentang penggunaan satelit untuk kepentingan kemanusiaan (*Working Group On Satelitte Aided SAR*) dari *International Aeronautical Federation*.

Bersamaan dengan pengembangan PUSARNAS tersebut, dirintis kerjasama dengan negara-negara tetangga yaitu Singapura, Malaysia, dan Australia. Untuk lebih mengefektifkan kegiatan SAR, maka pada tahun 1978

---

<sup>9</sup> <http://www.BASARNAS.go.id> (diakses pada tanggal 28 februari 2015)

Menteri Perhubungan selaku kuasa Ketua Basari mengeluarkan Keputusan Nomor 5/K.104/Pb-78 tentang penunjukkan Kepala PUSARNAS sebagai Ketua BASARI pada kegiatan operasi SAR di lapangan. Sedangkan untuk penanganan SAR di daerah dikeluarkan Instruksi Menteri Perhubungan IM 4/KP/Phb-78 untuk membentuk Satuan Tugas SAR di KKR (Kantor Koordinasi *Rescue*). Untuk efisiensi pelaksanaan tugas SAR di Indonesia, pada tahun 1979 melalui Keputusan Presiden Nomor 47 tahun 1979, PUSARNAS yang semula berada dibawah BASARI, dimasukkan kedalam struktur organisasi Departemen Perhubungan dan namanya diubah menjadi Badan SAR Nasional (BASARNAS).

Dengan diubahnya PUSARNAS menjadi Badan SAR Nasional, Kepala PUSARNAS yang semula eselon II menjadi Kepala Badan SAR Nasional eselon I. Demikian juga struktur organisasinya disempurnakan dan KABASARNAS membawahi 3 pejabat eselon II. Dalam perkembangannya keluar Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 80 tahun 1998 tentang Organisasi Tata Kerja Badan SAR Nasional, yang salah satu isinya mengenai pejabat eselon II di Badan SAR Nasional, yaitu :

1. Sekretaris Badan;
2. Kepala Pusat Bina Operasi;
3. Kepala Pusat Bina Potensi;

Adanya organisasi SAR akan memberikan rasa aman dalam penerbangan dan pelayaran. Sejalan dengan perkembangan moda

transportasi serta kemajuan IPTEK di bidang transportasi, maka mobilitas manusia dan barang dari suatu tempat ke tempat lain dalam lingkup nasional maupun internasional mempunyai resiko yang tinggi terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan yang menimpa pengguna jasa transportasi darat, laut dan udara. Penerbangan dan pelayaran internasional yang melintasi wilayah Indonesia membutuhkan jaminan tersedianya penyelenggaraan SAR apabila mengalami musibah di wilayah Indonesia. Tanpa adanya hal itu maka Indonesia akan dikategorikan sebagai "*black area*" untuk penerbangan dan pelayaran. Status "*black area*" dapat berpengaruh negatif dalam hubungan ekonomi dan politik Indonesia secara internasional. Terkait dengan masalah tersebut, Badan SAR Nasional sebagai instansi resmi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang SAR ikut mempunyai adil yang besar dalam menjaga citra Indonesia sebagai daerah yang aman untuk penerbangan dan pelayaran. Dengan citra yang baik tersebut diharapkan arus transportasi akan dapat berjalan dengan lancar dan pada gilirannya akan meningkatkan perekonomian nasional Indonesia.

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat mengenai pelayanan jasa SAR dan adanya perubahan situasi dan kondisi Indonesia serta untuk terus mengikuti perkembangan IPTEK, maka organisasi SAR di Indonesia terus mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu. Organisasi SAR di Indonesia saat ini diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan dan

Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 79 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor SAR.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan yang mengatur bahwa Pelaksanaan SAR (yang meliputi usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran, dan penerbangan, atau bencana atau musibah lainnya) dikoordinasikan oleh Badan SAR Nasional yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

- a. VISI Badan SAR Nasional adalah Berhasilnya pelaksanaan operasi SAR pada setiap waktu dan tempat dengan cepat, handal, dan aman "
- b. MISI Badan SAR Nasional adalah Menyelenggarakan kegiatan operasi SAR yang efektif dan efisien melalui upaya tindak awal yang maksimal serta pengerahan potensi SAR yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, fasilitas SAR yang memadai, dan prosedur kerja yang mantap dalam rangka mewujudkan Visi Badan SAR Nasional "
- c. Tugas Fungsi dan Sasaran Badan SAR Nasional
  1. Tugas pokok

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.43 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan tata kerja Departemen Perhubungan, Badan SAR Nasional mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian potensi *Search and Rescue* (SAR)

dalam kegiatan SAR terhadap orang dan material yang hilang atau dikhawatirkan hilang, atau menghadapi bahaya dalam pelayaran dan atau penerbangan, serta memberikan bantuan SAR dalam penanggulangan bencana dan musibah lainnya sesuai dengan peraturan SAR Nasional dan Internasional.

## 2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Badan SAR Nasional menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan potensi SAR dan pembinaan operasi SAR.
2. Pelaksanaan program pembinaan potensi SAR dan operasi SAR.
3. Pelaksanaan tindak awal.
4. Pemberian bantuan SAR dalam bencana dan musibah lainnya.
5. Koordinasi dan pengendalian operasi SAR alas potensi SAR yang dimiliki oleh instansi dan organisasi lain.
6. Pelaksanaan hubungan dan kerja sama di bidang SAR baik di dalam maupun luar negeri.
7. Evaluasi pelaksanaan pembinaan potensi SAR dan operasi SAR
8. Pelaksanaan administrasi di lingkungan Badan SAR Nasional<sup>10</sup>

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan SAR Nasional, perlu dilaksanakan strategi- strategi sebagai berikut :

1. Menjadikan Badan SAR Nasional sebagai yang terdepan dalam melaksanakan operasi SAR dalam musibah pelayaran dan penerbangan, bencana dan musibah lainnya;
2. Pembentukan Institusi yang dapat menangani pendidikan awal dan pendidikan penataran di lingkungan Badan SAR Nasional
3. Mengembangkan regulasi yang mampu mengerahkan potensi SAR melalui mekanisme koordinasi yang dipatuhi oleh semua potensi SAR;

---

<sup>10</sup> <http://www.BASARNAS.go.id> (diakses pada tanggal 28 februari 2015)

4. Melaksanakan pembinaan SDM SAR melalui pola pembinaan SDM yang terarah dan berlanjut agar dapat dibentuk tenaga-tenaga SAR yang profesional.
5. Melaksanakan pemenuhan sarana/ prasarana dan peralatan SAR secara bertahap agar dapat menjadikan operasi tindak awal SAR yang mandiri, cepat, tepat, dan handal sesuai ketentuan nasional dan internasional.
6. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan SAR melalui jenjang pendidikan sesuai dengan kebutuhan dalam lingkungan Badan SAR Nasional.
7. Penciptaan system sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang penyelenggaraan operasi SAR
8. Mengembangkan kerjasama dengan Pemda melalui FKSD, organisasi dan instansi berpotensi SAR, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka pembinaan potensi SAR.<sup>11</sup>

#### 4. Pengertian Pelatihan

Perkembangan bisnis dan persaingan antar organisasi bergerak dengan dan dinamis. Dengan kondisi seperti ini maka menuntut sebuah organisasi untuk dapat bersikap lebih tanggap dalam melakukan pengembangan terhadap sumber daya manusia-nya. Dalam menjawab tantangan tersebut, maka sudah banyak organisasi yang melakukan tindakan dalam rangka peningkatan kinerja anggota organisasi melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan diharapkan mampu berhasil sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Notoatmodjo, pelatihan adalah upaya untk mengembangkan sumber daya manusia, terutama untuk mengembangkan kemampuan

---

<sup>11</sup> <http://www.BASARNAS.go.id> (diakses pada tanggal 28 februari 2015)

intelektual dan kepribadian manusia.<sup>12</sup> Mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian merupakan dua hal yang mendasar untuk dapat ditingkatkan melalui sebuah pelatihan.

Sedangkan pengertian pelatihan menurut Nasution adalah suatu proses belajar mengajar dengan menggunakan teknik dan metode tertentu, guna meningkatkan keterampilan dan kemampuan kerja seseorang (karyawan atau sekelompok orang).<sup>13</sup> Terdapat tambahan unsur dalam peningkatan kinerja seseorang, yaitu keterampilan. Keterampilan juga merupakan hal yang penting dalam proses perbaikan dan peningkatan dari tujuan pelatihan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelatihan adalah suatu proses kegiatan pengembangan sumber daya manusia dengan melakukan peningkatan pada tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikap pegawai.

##### 5. Pengertian Program Pendidikan Latihan SAR

Pendidikan dan pelatihan SAR disebut diklat SAR adalah proses perubahan sikap dan perilaku sekelompok orang dalam upaya pendewasaan dan peningkatan kemampuan manusia. Dan peningkatkan sikap seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Pemeliharaan dan peningkatan

---

<sup>12</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), h.28.

<sup>13</sup> Mulia Nasution, *Manajemen Personalia : Aplikasi Dalam Perusahaan* ( Jakarta : Sapdodadi, 2000), h. 71.

kemampuan teknis di bidang SAR yang telah dimiliki peserta latihan untuk mendapatkan tenaga yang handal.

Badan SAR nasional memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan. karena badan yang telah dibentuk ini khusus menangani masalah-masalah atau bencana alam. Salah satu faktor yang harus terus ditingkatkan adalah sumber daya manusia yang ikut dalam menangani bencana alam.

Pelatihan dan pembinaan SAR dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan personil SAR telah dilakukan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan kepada masyarakat serta pembinaan SDM potensi SAR.

#### 1) Pelatihan SAR

a. Pelatihan dasar dan lanjutan SAR oleh Badan SAR Nasional, serta masing-masing instansi/organisasi.

- Latihan /Gladi Pos Komando ( Gladi Posko), untuk melatih prosedur tetap atau petunjuk pelaksanaan operasi SAR, dan melatih mekanisme staf dengan simulasi skenario latihan.
- Perencanaan dan pengendalian.
- Pencarian.
- Pertolongan.
- Penanggulangan Penderita Gawat Darurat (PPGD).
- Evakuasi.<sup>14</sup>

b. Pendidikan khusus atau spesialisasi yang dilakukan oleh Badan SAR Nasional, meliputi :

- Pendidikan SAR *Mission Coordination (SMC)*.
- Kemampuan perencanaan dan pengendalian operasi.
- Pendidikan SAR *Controller*.

---

<sup>14</sup> <http://www.BASARNAS.go.id> (diakses pada tanggal 28 februari 2015)

- Pendidikan operasi radio/ komunikasi elektronik.
- Pendidikan *Rescue* (kemampuan pertolongan)<sup>15</sup>

c. Mengikuti sertakan pendidikan keluar negeri, untuk membekali pengetahuan dasar SAR.

## 2) Pembinaan SAR

Pembinaan potensi SAR dilakukan sebagai bagian dari strategi jangka pendek Badan SAR Nasional yang dilaksanakan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut. Untuk menuju siapnya tenaga SAR yang handal dan professional maka pendidikan dan latihan dalam rangka pembinaan potensi SAR dapat dilakukan menjadi tiga tingkat.

- Diklat SAR tingkat Dasar
- Diklat SAR tingkat Lanjutan
- Diklat SAR tingkat Spesialis
- Diklat SAR tingkat Pendukung

Dengan banyaknya potensi SAR yang ada di berbagai kalangan masyarakat, maka instansi/organisasi dapat melakukan diklat SAR dengan kurikulum, silabus, instruktur dan sertifikat dari Badan SAR Nasional.

## 6. Tujuan Program Pendidikan Latihan Dasar

Tujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan dasar SAR kepada pegawai dilingkungan Badan SAR Nasional sehingga pelatihan

---

<sup>15</sup> <http://www.BASARNAS.go.id> (diakses pada tanggal 28 februari 2015)

ini dapat membentuk tenaga *Rescue* yang memiliki ,keterampilan, pengetahuan,sikap dan mental dibidang teknik pencarian dan pertolongan terhadap korban pada Tingkat Dasar. Dari pelatihan *water rescue* adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan mental dalam melakukan pertolongan air. Sedangkan tujuan dari pelatihan *High Angle Rescue Techniques* adalah untuk membekali anggota Badan SAR Nasional terutama *Rescuer* dengan kemampuan SAR agar memiliki kompetensi dalam melakukan pencarian, pertolongan serta evakuasi korban di medan vertical atau tebing.

- Memahami tentang operasi SAR di Indonesia.
- mampu melakukan teknik pertolongan pertama pada korban
- mampu melakukan teknik evakuasi korban dimedan *vertical*
- mampu melakukan pencarian dan pertolongan di gunung /hutan
- mampu melakukan teknik pertolongan di air tingkat dasar
- memiliki pengetahuan dan keterampilan pendukung operasi SAR
- mampu melakukan kegiatan *rappelling* dan *water free jump helicopter*
- memiliki sikap mental yang layak sebagai tenaga *rescue*<sup>16</sup>

### **C. Model Evaluasi Program**

Salah satu permasalahan ketika hendak melakukan evaluasi adalah pemilihan model paling sesuai terhadap program yang dievaluasi. Pemilihan model evaluasi ini sangat penting, karena setiap program memiliki karakteristik yang berbeda dan setiap model evaluasi memiliki asumsi, pendekatan, terminologi dan logika berfikir yang berbeda. Oleh karena itu

---

<sup>16</sup> [http ://www.BASARNAS.go.id](http://www.BASARNAS.go.id) (diakses pada tanggal 28 februari 2015)

penggunaan lebih dari satu model dalam evaluasi sangat tidak disarankan karena akan menimbulkan Salah satu permasalahan ketika hendak melakukan evaluasi adalah pemilihan model paling sesuai terhadap program yang dievaluasi. Pemilihan model evaluasi ini sangat penting, karena setiap program memiliki karakteristik yang berbeda dan setiap model evaluasi memiliki asumsi, pendekatan, terminologi dan logika berfikir yang berbeda. Oleh karena itu penggunaan lebih dari satu model dalam evaluasi sangat tidak disarankan karena akan menimbulkan kerancuan dan benturan logika antar model. Setiap model evaluasi tetap memiliki keterbatasan, namun pemilihan model yang tepat akan berimplikasi langsung terhadap kualitas informasi yang dihasilkan oleh suatu evaluasi.

Evaluasi program mempunyai banyak model yang akan digunakan, salah satunya adalah evaluasi program dengan model evaluasi CIPP (*context, input, proses and product*) pertama kali ditawarkan oleh Stufflebeam pada tahun 1965 sebagai hasil usaha mengevaluasi ESEA (*The Elementary And Secondary Education Act*) dengan pandangan bahwa tujuan penting evaluasi adalah bukan membuktikan tetapi untuk memperbaiki. Evaluasi program model CIPP ini berorientasi pada pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. *Context evaluation* :

Evaluasi konteks adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang

dilayani dan tujuan proyek. Contoh pengajuan pertanyaan, untuk evaluasi yang di arahkan pada program makanan tambahan anak sekolah (PMTAS). Ada empat pertanyaan yang dapat diajukan sehubungan dengan evaluasi konteks, yaitu sebagai berikut.

- 1) Kebutuhan apa saja yang belum terpenuhi oleh program, misalnya jenis makanan dan siswa yang belum menerima?
- 2) Tujuan pengembangan apakah yang belum dapat tercapai oleh program misalnya peningkatan kesehatan dan prestasi siswa karena adanya makanan tambahan?
- 3) Tujuan pengembangan apakah yang dapat membantu mengembangkan masyarakat, misalnya kesadaran orang tua untuk memberikan makanan bergizi kepada anak-anaknya?
- 4) Tujuan mana sajakah yang paling mudah dicapai, misalnya pemerataan makanan, ketepatan penyediaan makanan?

## 2. *Input Evaluation* :

menyediakan informasi untuk menentukan bagaimana sumber-sumber yang ada di manfaatkan untuk pencapaian tujuan. Hal ini dapat diketahui dengan mengidentifikasi dan memeriksa (1) kemampuan yang relevan dari agen yang bertanggung jawab (kemampuan sistem) (2) strategi yang digunakan dalam pencapaian tujuajn program, dan (3) desain yang digunakan untuk penerapan strategi itu.

Maksud dari evaluasi input ini adalah meliputi analisis personal yang berhubungan dengan bagaimana penggunaan sumber-sumber yang tersedia yang harus dipertimbangkan untuk mencapai suatu program, bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya, mengidentifikasi dan menilai kapabilitas sistem, alternatif strategis program, desain prosedur untuk strategis implementasi, pembiayaan dan penjadwalan. Pertanyaan yang mendasar dari evaluasi input adalah bagaimana perencanaan penggunaan sumber-sumber yang ada sebagai upaya memperoleh rencana program yang efektif dan efisien.

Metode yang digunakan pendataan mengenai jumlah orang dan berbagai hal yang merupakan sumber, strategis solusi, perencanaan prosedural yang sesuai serta memungkinkan untuk dilaksanakan dan pembiayaan yang ekonomis, selain itu dapat juga menggunakan metode pengamatan dokumen, mengamati kegiatan yang sedang berlangsung dan kepada tim pelaksanaan kegiatan.

### 3. *Proses Evaluation* :

suatu evaluasi proses menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memandu implementasi strategi program, prosedur dan aktivitas, seperti halnya untuk identifikasi kegagalan atau kesuksesan. Evaluasi proses merupakan evaluasi yang diranvang dan diaplikasikan dalam praktek, implementasi kegiatan, sampai sejauh mana rencana telah diterapkan dan apa yang harus direvisi. Setiap aktivitas dimonitor perubahan-perubahan

yang terjadi secara jujur dan cermat disamping itu catatan akan berguna untuk menentukan kekuatan dan kelemahan atau program ketika dikaitkan dengan keluaran yang ditemukan. Oleh *Stufflebeam* disusun pertanyaan-pertanyaan untuk proses antara lain sebagai berikut:

- Apakah staf yang terlibat didalam pelaksanaan program akan sanggup menangani kegiatan selama proses berlangsung dan jika kemungkinan di lanjutkan?
- Apakah sarana dan prasarana dimanfaatkan secara maksimal?
- Hambatan-hambatan apa saja yang dijumpai selama pelaksanaan program dan kemungkinan jika program dilanjutkan?

Metode yang digunakan, yaitu memonitor hambatan yang potensial pada kegiatan dan selalu waspada terhadap hal-hal yang tidak terantisipasi, yaitu denhan program melalui penjabaran terhadap proses yang tengah berlangsung serta melakukan interaksi dan pengamatan yang berkesinambungan pada kegiatan tersebut.

#### 4. *Product Evaluation* :

Hasil yang dicapai baik selama maupun pada akhir pengembangan system pendidikan yang bersangkutan. Selain hal tersebut ada empat asumsi yang mendasari model CIPP, yang perencanaan keputusan yang mempengaruhi pemilihan tujuan umum dan tujuan khusus, kedua keputusan pembentukan atau structuring yang kegiatannya mencakup pemastian

strategis optimal dan desain proses untuk mencapai tujuan yang telah diturunkan dari keputusan perencanaan, ketiga keputusan implementasi, dimana pada keputusan ini para evaluator mengusahakan sarana prasarana untuk menghasilkan dan meningkatkan pengambilan keputusan atau eksekusi, rencana, metode dan strategi yang hendak di pilih, yang keempat keputusan pemutaran (recycling) yang menentukan, jika suatu program itu diteruskan dengan modifikasi, atau diberhentikan secara total atau dasar kriteria yang ada.

Sehingga tujuan akhir dari evaluasi program adalah memberikan penilaian tentang program yang dijalankan tersebut, serta memberikan rekomendasi bagi pengambilan keputusan selanjutnya terhadap pelaksanaan program tersebut.

#### **D. Hasil Penelitian yang Relevan**

Hasil penelitian yang relevan pada penelitian jenis ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Wita Puspitasari dengan Evaluasi Pelaksanaan Program “Diklat Teknis Subtantif Dasar (DTSD) Kepabeanan Dan Cukai” Khusus Lulusan Prodi I Tahun Anggaran 2009 Di Pusdiklat Bea dan Cukai, jurusan kurikulum dan Teknologi pendidikan Universitas Negeri Jakarta Tahun 2009.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas Program Diklat Teknik Subtantif (DTSD) Kepabeanan dan Cukai Khusus Lulusan Prodi I Tahun Anggaran 2009 pada Pusdiklat Bea dan Cukai. Model

pada penelitian ini adalah model CIPP (*context, input, process, product*) yang dikembangkan oleh Stufflebeam.

Hasil penelitian mengenai *context*, diperoleh bahwa terdapat kesesuaian antara permasalahan institusi, tujuan diklat, *Need Assessment*, serta lingkungan dengan tujuan diklat. Namun dalam pelaksanaan *Need Assessment* masih kurang dengan sesuai prosedur yang seharusnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Belum Menjalankan tugasnya dengan baik dalam menentukan *Need Assessment*.

Hasil penelitian mengenai *input* diperoleh bahwa kriteria peserta diklat, kriteria dan kompetensi widyaiswara, bahan ajar serta diklat yang meliputi perencanaan metode, media, dan alat evaluasi yang digunakan telah cukup sesuai dengan tujuan pembelajaran. Hanya saja fasilitas yang disediakan masih dapat dikatakan belum menunjang proses pembelajaran dan belum memberikan kenyamanan bagi peserta diklat. Dari segi tata tertib yang diterapkan telah sesuai dengan tata tertib yang tercantum dalam Pedoman Penyelenggaraan Diklat Teknis Substantif Dasar (DTSD).

Hasil penelitian mengenai *process* diperoleh bahwa proses perencanaan telah berjalan dengan baik, meskipun tidak semua widyaiswara menjelaskan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa. Interaksi yang berlangsung antara siswa dengan widyaiswara telah berjalan dengan baik. Namun dalam menciptakan iklim belajar yang kondusif, beberapa widyaiswara masih belum menerapkannya.

Hasil penelitian mengenai *product* diperoleh bahwa ketercapaian tujuan diklat oleh peserta dapat dikatakan telah tercapai dengan baik. Seluruh peserta diklat dinyatakan lulus dalam mengikuti Diklat Teknis Substantif Dasar (DTDS) Kepabeanaan dan Cukai Khusus Lulusan Prodip 1 Tahun Anggaran 2009, walaupun terdapat 8 orang siswa yang harus mengikuti perbaikan untuk beberapa mata pelajaran.

Secara umum hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penelitian evaluasi pelaksanaan Diklat Teknis Substantif Dasar (DTDS) Kepabeanaan dan Cukai Khusus Lulusan Prodip 1 Tahun Anggaran 2009 pada Pusdiklat Bea dan Cukai telah terselenggarakan dengan baik.

#### **E. Kriteria Evaluasi**

Diklat merupakan proses belajar untuk meningkatkan *knowledge*, *skill*, *attitude* dan *behaviour* individu atau pegawai guna mewujudkan sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau perusahaan dalam pemenuhan standar sumber daya manusia yang diinginkan. Penyelenggaraan pelatihan yang sesuai prosedur diharapkan dapat mencapai tujuan dengan optimal. Lulusan pelatihan diharapkan dapat memiliki kompetensi sesuai yang telah diajarkan selama pelatihan.

Badan SAR Nasional (BASARNAS) adalah lembaga pemerintah nonkementrian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pencarian dan pertolongan (*Search and Rescue*). Yang awalnya berada

dibawah naungan Departemen Perhubungan, dalam melaksanakan tugas pokoknya memerlukan dukungan dan partisipasi dari semua pihak dalam memanfaatkan berbagai fasilitas sarana, prasarana, personil dan material yang dimiliki oleh berbagai instansi pemerintah, swasta, organisasi, dan masyarakat.

Badan SAR Nasional memiliki berbagai program diklat yang telah dirancang setiap tahunnya. Program diklat tersebut telah dirancang dengan baik, seperti Diklat SAR Tingkat Lanjutan, Diklat SAR Tingkat Spesialis, Diklat SAR Tingkat Pendukung yang salah satu nya adalah Diklat SAR Tingkat Dasar. Diklat SAR Tingkat Dasar ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dasar di bidang pencarian dan pertolongan. Diklat tersebut diperuntukan bagi para pegawai Badan SAR Nasional dan yang belum pernah mengikuti Diklat SAR Tingkat Dasar. Diharapkan setelah mengikuti diklat ini peserta pelatihan mampu menyelenggarakan tata kerja rutin.

Untuk menilai keberhasilan dari suatu program pelatihan Diklat SAR Tingkat Dasar di Badan SAR Nasional, maka hal yang sangat penting dan perlu untuk dilakukan adalah bagaimana memperhatikan aspek evaluasi program pelatihan. Evaluasi program pelatihan adalah upaya untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan suatu program secara cermat dengan cara mengetahui efektifitas masing-masing komponennya.

Evaluasi mempunyai ukuran keberhasilan, yang dikenal dengan istilah kriteria. Kriteria adalah sesuatu yang digunakan sebagai patokan atau batas minimal atas sesuatu yang diukur. Dasar dalam pembuatan kriteria adalah sumber pengambilan kriteria secara keseluruhan. Karena adanya objek yang akan diukur dan dengan harapan serta kondisi yang berbeda-beda, maka ada beberapa sumber dalam pembuatan kriteria, diantaranya adalah : peraturan atau ketentuan yang sudah dikeluarkan berkenaan dengan kebijakan yang bersangkutan, buku pedoman penyelenggaraan Diklat SAR Tingkat Dasar, konsep atau teori-teori yang terdapat dalam buku-buku ilmiah, kurikulum, anggaran perencanaan diklat.

Untuk melakukan serangkaian proses evaluasi program, dibutuhkan sebuah model yang dapat dijadikan acuan untuk mengukur tingkat keberhasilan program. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model CIPP yang dikembangkan oleh Stufflebeam. Model evaluasi ini terdiri dari empat komponen yaitu *Context, Input, Process, Product*. Model ini dipilih karena sesuai dengan kebutuhan yang ada di Balai Diklat Badan SAR Nasional, yaitu untuk mengevaluasi proses, masukan dan hasil. Model ini dipilih juga karena sifatnya yang rasional dan sistemik dalam pendekatannya. Serta model ini komprehensif, mudah dimengerti dan dapat diterapkan dalam pembelajaran apapun.

Untuk mengukur evaluasi konteks dalam penelitian ini, digunakan metode studi dokumentasi dan wawancara mengenai landasan dan rasional,

latar belakang serta kesesuaian tujuan program Diklat SAR Tingkat Dasar terhadap permasalahan dan kebutuhan diadakannya program nsaat ini. Begitu pun dengan evaluasi masukan, metode yang digunakan adalah studi dokumentasi dan wawancara mengenai ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, desain pembelajaran atau pelatihan dan jadwal.

Untuk melakukan evaluasi umumnya digunakan alat ukur berupa tes maupun non tes. Alat ukur non tes misalnya observasi, wawancara, skala, daftar cek, studi kasus, portofolio, dan lain sebagainya. Sedangkan alat ukur berupa tes dapat dibedakan menjadi 3 jenis; tes lisan, tes tulisan, dan tes sikap. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan evaluasi menggunakan alat ukur non tes yaitu observasi dan wawancara.